

**ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) DALAM PENGELOLAAN INFORMASI
PEMERINTAHAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Ada Anjanette Banunaek
NPP. 30.1098

*Asdaf Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Teknologi Rekayasa Informaasi Pemerintahan
banunaeklilo@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Irfan Uluputty, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): *Advances in technology, information and communication naturally have advantages and disadvantages. One of the disadvantages lies in the process of managing and communicating information to the public. The challenge in managing and communicating information that is currently being faced is the post-truth phenomenon that is occurring in society, in this case related to the spread of fake news, so much information is still questionable . Government must play its role in addressing these issues, particularly in the area of government information management. **Objective:** The researchers' goal is to focus on the implementation of an enterprise architecture in the management of government information to prevent the spread of fake news in East Nusa Tenggara Province. **Method:** The method used is qualitatively descriptive with an inductive approach and data collection techniques using interviews, documentation and observation. The data analysis steps used are data acquisition, data reduction, data presentation, and verification/conclusion. The research uses enterprise architecture theory using the Zachman framework, which has the following dimensions: methods of government public relations work (how), organizational goals of public relations (why), implementation of government public relations work program (when), Performance Evaluation of Government Public Relations (What), State Public Relations Organization (Who), Scope of Implementation of Public Relations Tasks (Where). **Results/Findings:** The results of the study show that government information management works well in terms of work mechanisms, goal attainment and job performance, performance evaluation results, team organization and division of team work, although there are several inhibiting factors in this management. Responsible are the unavailability of a budget for the implementation of work programs related to public relations, the lack of program operating standards related to information services, the unavailability of facilities and infrastructure to support public relations activities and the lack of human resources an IT background in the PR team, because it still needs to be improved. **Conclusion :** This study concludes that the management of government information using the enterprise architecture method in NTT province performed well but sub-optimal due to several implementation limitations.*

Keywords: *Government Public Relations, Information Services, Enterprise Architecture*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, salah satu kekurangan yaitu dalam proses pengelolaan dan penyampaian informasi terhadap masyarakat. Tantangan dalam pengelolaan dan penyampaian informasi yang dihadapi saat ini yaitu fenomena *post-truth* yang terjadi dalam masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan penyebaran berita hoaks sehingga banyak informasi yang masih dipertanyakan kebenarannya. Pemerintah dituntut untuk melaksanakan perannya dalam menaggulangi permasalahan tersebut khususnya dalam bidang pengelolaan

informasi pemerintahan. **Tujuan:** Tujuan dari peneliti adalah berfokus kepada penerapan *enterprise architecture* dalam pengelolaan informasi pemerintahan sehingga dapat mencegah penyebaran hoaks di Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Metode:** Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, serta observasi. Adapun langkah-langkah analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi/penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori *Enterprise Architecture* dengan menggunakan *Zachman Framework* yang mempunyai dimensi: Metode Kerja Humas Pemerintahan (*How*), Tujuan Organuasai Kehumasan (*Why*), Pelaksanaan Program Kerja Humas Pemerintahan (*When*), Evaluasi Kinerja Humas Pemerintahan (*What*), Pengorganisasian Humas Pemerintahan (*Who*), Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Kehumasan (*Where*). **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan informasi pemerintahan sudah berjalan dengan baik dari segi mekanisme kerja, pencapaian target kerja dan prestasi yang didapat, hasil evaluasi kinerja, pengorganisasian tim, dan pembagian kerja tim walaupun terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan tersebut. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program kerja terkait kehumasan, belum adanya SOP terkait pelayanan informasi, kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan kehumasan dan masih kurangnya SDM yang memiliki latar belakan IT dalam tim Humas merupakan faktor yang asih harus diperbaiki. **Kesimpulan :** Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan informasi pemerintahan menggunakan metode *enterprise architecture* di Provinsi NTT telah berjalan dengan baik namun belum maksimal dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya.

Kata Kunci: Humas Pemerintahan, Informasi Pemerintahan, *Enterprise Architecture*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Internet tentu saja membawa dampak positif dan negatif. Pengaruh positif dari internet yaitu dapat mempermudah mobilitas masyarakat, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses informasi serta ilmu pengetahuan. Pada sisi lain, pengaruh negatif dari internet yaitu sebagai media penyebaran berita hoaks (informasi palsu), fitnah, sikap intoleran, provokasi, dan lain-lain.¹ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), informasi yang diterima oleh masyarakat melalui berbagai media informasi belum tentu benar. Seringkali, informasi yang beredar pada media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan media sosial lainnya juga belum tentu benar. Tantangan yang dihadapi dalam permasalahan kemajuan teknologi khususnya dalam bidang informasi ini yaitu lemahnya daya tangkap masyarakat dalam mencerna informasi yang didapat.² Fenomena *post-truth* banyak beredar dalam masyarakat sehingga sebuah informasi yang beredar ditengah masyarakat susah teridentifikasi kebenarannya karena telah bercampur dengan informasi lainnya yang masih dipertanyakan kebenarannya.

Potensi penyebaran berita hoaks dinilai tinggi akibat jumlah penggunaan internet aktif, maka pemerintah NTT melalui humas pemerintahan melakukan beberapa tindakan melalui komunikasi publik yaitu sebagai berikut: Pemasangan Baliho edukasi, Dialog Publik di Radio Republik Indonesia (RRI), Dialog Publik di Televisi Republik Indonesia (TVRI), Inovasi

¹ Aulia Rahmawati and Krisanjaya Krisanjaya, "Literasi Media Untuk Mengantisipasi Berita Palsu (Hoaks) Di Media Sosial Bagi Masyarakat Pulau Tidung Kepulauan Seribu," *Sarwahita* 16, no. 01 (2019): 68–74, <https://doi.org/10.21009/sarwahita.161.07>.

² Departemen Ilmu Komunikasi and Universitas Indonesia, "Etika Media Di Era 'Post-Truth'" V, no. April (2017): 75–79.

Pelayanan Informasi Publik berbasis android (PPID Utama), Penyampaian Informasi Publik Melalui Media Sosial. Pada era perkembangan IT, masyarakat lebih dominan menggunakan media sosial untuk melakukan proses komunikasi. Diskominfo yang juga berperan sebagai Humas pemerintahan di lingkup provinsi melihat fenomena ini sebagai wadah dalam pelaksanaan penyampaian informasi publik sehingga memanfaatkan media sosial dalam melakukan pelayanan informasi publik. Perkembangan data konten hoaks yang disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab dan telah teridentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga tahun 2020 sebanyak 5.156 konten hoaks. Terdapat beberapa isu sensitif yang dijadikan sebagai bahan berita hoaks seperti isu mengenai politik, kesehatan, kejahatan, pemerintahan dan masih banyak lagi. Di antara kategori kasus penyebaran berita hoaks, isu yang menduduki peringkat pertama yaitu isu mengenai politik sebanyak 1.025 kasus, isu pemerintahan sebanyak 922 kasus dan isu kesehatan sebanyak 853 kasus.³ Pada tiga tahun terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan jumlah pemakai internet lebih dari 40% tiap kabupaten/kota di Provinsi NTT.⁴ Hal ini tentu saja merupakan angka yang tergolong besar di mana potensi penyebaran berita hoaks bisa terjadi dan menyebar dengan cepat jika tidak ada tanggapan atau program serius yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Humas pemerintahan. Berikut data pengguna internet termasuk media sosial di provinsi ini pada periode Tahun 2019 – 2022. Pada tahun 2021, Humas pemerintahan Provinsi NTT mendapatkan penghargaan Anugerah Media Humas dalam kategori komunikasi publik. Hal ini membuktikan bahwa, peran Humas pemerintahan sangat berpengaruh dalam pengelolaan komunikasi publik di lingkungan pemerintahan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada tiga tahun terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan jumlah pemakai internet lebih dari 40% tiap kabupaten/kota di Provinsi NTT.⁵ Hal ini tentu saja merupakan angka yang tergolong besar di mana potensi penyebaran berita hoaks bisa terjadi dan menyebar dengan cepat jika tidak ada tanggapan atau program serius yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Humas pemerintahan. Berikut data pengguna internet termasuk media sosial di provinsi ini pada periode Tahun 2019 – 2022.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook. Twitter. BBM. Whatsapp) Periode 2019 - 2021⁶

Wilayah	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Alor	26,24	35,31	45,80	21,15	28,46	37,43	23,61	31,77	41,51
Belu	26,64	36,63	47,56	20,62	33,33	44,99	23,63	34,97	46,27
Ende	27,60	37,61	56,07	22,16	32,28	46,63	24,72	34,80	51,09

³ "Detail Data Statistik Hoaks Agustus 2018 - 31 Maret 2020 - PPID Kominfo," accessed October 16, 2022, https://eppid.kominfo.go.id/informasi_publik/Informasi_Publik_Setiap_Saat/detail/57.

⁴ "BPS Provinsi NTT," accessed October 16, 2022, <https://ntt.bps.go.id/indicator/2/1040/1/persentase-penduduk-berumur-5-tahun-ke-atas-yang-mengakses-internet-termasuk-facebook-twitter-bbm-whatsapp-dalam-3-bulan-terakhir.html>.

⁵ "BPS Provinsi NTT," accessed October 16, 2022, <https://ntt.bps.go.id/indicator/2/1040/1/persentase-penduduk-berumur-5-tahun-ke-atas-yang-mengakses-internet-termasuk-facebook-twitter-bbm-whatsapp-dalam-3-bulan-terakhir.html>.

⁶ "BPS Provinsi NTT."

Wilayah	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Flores Timur	34,22	40,81	46,59	27,03	32,63	35,79	30,44	36,51	40,92
Kota Kupang	63,69	72,36	80,50	62,04	71,43	79,22	62,89	71,91	79,87
Kupang	27,98	30,77	39,07	22,35	29,90	35,31	25,23	30,34	37,22
Lembata	28,69	34,11	50,78	22,19	28,00	40,05	25,19	30,82	45,05
Malaka	23,35	25,51	34,10	21,65	24,43	35,70	22,47	24,95	34,92
Manggarai	24,56	29,75	46,18	23,14	28,87	40,59	23,83	29,30	43,31
Manggarai Barat	23,53	30,55	47,69	18,48	23,69	39,16	20,95	27,11	43,36
Manggarai Timur	20,27	19,27	37,84	13,41	13,89	30,25	16,79	16,53	33,98
Nagekeo	25,85	30,64	42,49	21,91	22,10	33,82	23,81	26,26	38,01
Ngada	29,20	35,39	49,44	25,18	32,37	43,60	27,13	33,83	46,47
Nusa Tenggara Timur	28,31	34,03	45,59	24,33	30,10	40,75	26,29	32,04	43,14
Rote Ndao	30,01	37,25	41,05	24,47	32,65	38,09	27,28	34,97	39,58
Sabu Raijua	21,44	33,55	45,27	19,16	29,64	38,81	20,33	31,63	42,08
Sikka	34,40	38,13	47,17	30,43	33,38	41,77	32,28	35,60	44,30
Sumba Barat	19,34	26,32	34,96	18,59	23,69	31,41	18,98	25,05	33,24
Sumba Barat Daya	12,84	18,88	25,60	11,14	15,43	25,52	11,99	17,17	25,56
Sumba Tengah	17,35	19,49	33,87	16,39	19,20	31,19	16,88	19,35	32,57
Sumba Timur	29,14	35,65	52,76	28,51	30,05	49,61	28,83	32,91	51,22
TTS	17,44	21,00	30,74	14,74	18,42	28,32	16,06	19,70	29,51
TTU	27,38	31,39	46,44	22,35	28,53	42,59	24,82	29,94	44,50

Pengguna aktif Internet di NTT khususnya masyarakat yang berumur lima tahun keatas berjumlah hampir setengah dari total masyarakat NTT.⁷ Media sosial memiliki peran bagi masyarakat agar mendapatkan berbagai informasi. Hal ini dapat mempengaruhi perubahan peran masyarakat dalam media.⁸ Peluang penyebaran berita hoaks melalui sosial media tentu saja sangat besar peluangnya jika masyarakat sebagai konsumen informasi tidak pandai atau kurang pandai dalam menyaring informasi yang didapat.

Potensi penyebaran berita hoaks dinilai tinggi akibat jumlah penggunaan internet aktif, maka pemerintah NTT melalui humas pemerintahan melakukan beberapa tindakan melalui komunikasi publik yaitu sebagai berikut: Pemasangan Baliho edukasi, Dialog Publik di Radio Republik Indonesia (RRI), Dialog Publik di Televisi Republik Indonesia (TVRI), Inovasi Pelayanan Informasi Publik berbasis android (PPID Utama), Penyampaian Informasi Publik Melalui Media Sosial.

Pada era perkembangan IT, masyarakat lebih dominan menggunakan media sosial untuk melakukan proses komunikasi. Diskominfo yang juga berperan sebagai Humas pemerintahan di lingkup provinsi melihat fenomena ini sebagai wadah dalam pelaksanaan penyampaian informasi publik sehingga memanfaatkan media sosial dalam melakukan pelayanan informasi publik.

⁷ Data total Jumlah penduduk Provinsi NTT pada Tahun 2021 sebesar 5,48 Juta Jiwa.

⁸ Dyah Risky, "Fenomena Post Truth Dalam Kampanye Politik Di Media Sosial Twitter," 2020.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai penanggulangan berita hoaks dan pemanfaatan EA dari beberapa daerah yang menjadi pedoman penulis untuk melaksanakan penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama, dalam jurnal yang ditulis oleh Arifuddin, Apriadi dan Ofi Hidayat pada Tahun 2020 dengan judul Strategi Polres Sumbawa dalam Menangani Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial. Penelitian ini menggunakan Teori Strategi dengan pendekatan penelitian kualitatif dan membahas mengenai bagaimana cara Polres Sumbawa dalam melaksanakan penanganan serta tindak lanjut mengenai kasus penyebaran berita hoaks di Sumbawa dimana pihak Polres bekerjasama dengan diskominfo membuat suatu unit khusus untuk mengontrol dan mengidentifikasi mengenai hoaks. Kedua, jurnal yang ditulis oleh Pitri Megasari pada Tahun 2020 mengenai kebijakan pemerintah Surabaya dalam menangani berita hoax dengan menggunakan teori analisis dan pendekatan penelitian kualitatif. Penanganan kasus hoaks di Surabaya sendiri dilakukan oleh tim humas pemerintahan kota Surabaya dengan cara mengecek langsung kebenaran berita yang tersebar di masyarakat dan mengkonfirmasi kepada masyarakat. Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Julianus Edwin Latupeirissa, John Dirk Pasalbessy, Elias Zadrak Leasa dan Carolina Tuhumury pada Tahun 2021 dengan menggunakan teori yuridis empiris dan pendekatan penelitian kualitatif yang membahas mengenai Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku. Penanganan mengenai berita hoaks di Kota Ambon dilakukan dengan pendekatan hukum yaitu pelaku ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku oleh pihak kepolisian. Selain melalui jalur hukum, pemerintah memberikan layanan berupa sarana pengaduan bagi masyarakat lewat situs <https://dumas.kominfo.go.id/>. Keempat, jurnal yang ditulis oleh Riman Irfanto dan Johannes Fernandes Andry pada Tahun 2017 mengenai Perancangan *Enterprise Architecture* Menggunakan *Zachman Framework* (Studi Kasus: Pt. Vivamas Adipratama) menggunakan Teori *Enterprise Architecture (Zachman Framework)*, Metode Penelitian Kualitatif dimana PT. Vivamas Adipratama menerapkan *enterprise architecture* dalam membangun sistem perusahaan dengan memanfaatkan teknologi dan teknologi juga berperan sebagai investasi jangka panjang dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Andi Saepul Marjuki dan Rinda Cahyana pada 2017 mengenai Penerapan *Framework TOGAF-ADM* Dalam Perancangan *Enterprise Architecture* Desa Wisata dengan menggunakan teori *Enterprise Architecture (TOGAF-ADM)* dan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian berupa rancangan *framework TOGAF-ADM* untuk pengembangan desa wisata yang menjadi panduan untuk aparat desa untuk menjalankan bisnis desa wisata agar lebih terintegrasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni akan melihat bagaimana pemerintah Provinsi NTT mengolah informasi pemerintahan dan memberi pelayanan informasi dengan menggunakan *enterprise architecture* yang belum pernah digunakan dalam lingkup pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan teori EA menggunakan *Zachman framework* yang mempunyai 6 dimensi yaitu: *what, who, where, when, why, dan how*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan data dianalisis menggunakan teknik triangulasi data.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pengeolaan Informasi Pemerintahan di Provinsi NTT apakah sudah berjalan secara optimal atau belum.

II. METODE

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan metode dalam pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Peneliti menyajikan data mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi pemerintahan oleh humas yang kemudian dianalisis dalam bentuk deskripsi. Tujuan peneliti memilih penelitian deskriptif ialah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara factual dan sistematis tentang fakta yang terjadi di lapangan dan dihubungkan dengan fenomena atau peristiwa yang diteliti.⁹ Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian Kualitatif ditunjukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau prespektif partisipan atau informan.¹⁰ Penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan sebagai pemecahan masalah secara holistic-kontektual dengan mengumpulkan data secara alami dan peneliti sebagai instrument kunci. Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu person (informan) sebagai pendukung dengan melakukan wawancara bersama pihak-pihak terkait. Kemudian, sumber data sekunder yang dipakai penulis yaitu paper (dokumen) dan hasil pengamatan dari peneliti sendiri yang dilakukan di lapangan (observasi) yang merupakan sumber data sebagai pendukung sumber data primer.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membahas mengenai deskripsi serta analisis data yang diperoleh peneliti pada koleksi primer dan sekunder yang dilakukan di lapangan. Data utama penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan proses pelayanan dan pengelolaan informasi pemerintahan. Data tersebut merupakan data utama dalam analisis, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dan hasil pengamatan penulis yang dilakukan di lapangan untuk memperkuat dan memperdalam hasil analisis. Hasil penelitian tersebut menjelaskan mengenai pengelolaan informasi pemerintahan di Provinsi NTT dengan menerapkan EA.

Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan *enterprise architecture* dengan *zachman framework* :

3.1 Metode Kerja Humas Pemerintahan (*How*)

Diskominfo menetapkan, mengelola, serta mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi oleh humas pemerintahan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam mengelola informasi, humas pemerintahan mempunyai pembagian tugas sesuai dengan surat keputusan penugasan atau jabatan dalam tim yang telah ditetapkan. Berjalannya suatu kegiatan penyampaian informasi dilihat dari cara tim bekerja.

a. Mekanisme Kerja Humas pemerintahan

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

¹⁰ Skmm.Kes Dr. Sandu Siyoto, "Dasar Metodologi Penelitian - Google Books," June 1, 2015, https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Metodologi_Penelitian/Qphfdwaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=Buku+Metode+Penelitian&printsec=frontcover.

Tugas humas pemerintahan adalah mencakup segala kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.¹¹ Humas pemerintahan dipegang oleh Diskominfo di bawah Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang dikelola oleh Tim Multimedia. Tim multimedia bertugas untuk menjalankan fungsi kehumasan yaitu untuk menyampaikan komunikasi, informasi, edukasi dan motivasi publik kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional penyampaian informasi.

Tugas dari tim multimedia atau tim humas dalam mengolah informasi yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kerahasiaan password masing-masing akun media sosial yang dikelola.
2. Melakukan kegiatan peliputan, pengeditan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah, minimal lima produk per bulan.
3. Hasil foto dan video yang telah diedit, diserahkan kepada koordinator pengelolaan media sosial paling lambat 1x24 jam untuk diproses lebih lanjut.
4. Menyiapkan narasi tentang keterangan foto dan video yang telah dibuat.
5. Melakukan publikasi hasil foto dan video yang telah disetujui pimpinan yaitu pada website *nttprov.go.id* dan *ppidutama.nntprov.go.id*, media sosial resmi pemerintah daerah (*Youtube, Facebook, dan Instagram*) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.¹²

Humas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya juga dibantu dengan kelompok informasi masyarakat (KIM). KIM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 tahun 2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial. Tujuan pembentukan KIM adalah untuk melibatkan masyarakat dalam memperlancar kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat, serta menjembatani masyarakat dan pemerintahan daerah dalam penyebaran informasi pemerintahan serta penyerapan aspirasi masyarakat.

Tim humas pemerintahan tidak hanya bertugas untuk melakukan pelaksanaan pelayanan informasi, tetapi tim humas juga melaksanakan fungsi yaitu evaluasi dimana tim humas pemerintah menerima masukan dari masyarakat melalui survey kepuasan masyarakat yang tertera pada akun media sosial dan website pelayanan informasi diskominfo.

Berdasarkan hasil penelitian, Humas pemerintahan Prov. NTT dijalankan oleh Tim Multimedia yang berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT. Tim Multimedia menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Diskominfo Prov. NTT Nomor : 048 / 177 / KOMINFO 2.1 / KEP / 2022 tentang pembentukan Tim Multimedia Provinsi NTT.

b. Program Kerja Humas Pemerintahan

Humas sendiri tidak memiliki program kerja khusus karena program kerjanya menyesuaikan dengan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi, informasi, edukasi dan motivasi publik pada Tahun 2022 yaitu:

Tabel 3.1
Program Kerja Humas pemerintahan Prov. NTT Tahun 2021-2022¹³

No	Program Kerja	Tahun
----	---------------	-------

¹¹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.

¹² Surat Keputusan Kepala Diskominfo Prov. NTT Nomor : 048 / 177 / KOMINFO 2.1 / KEP / 2022 tentang Pembentukan Tim Multimedia pada Dinas Komunikasi Prov. NTT tahun 2022

¹³ Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT tahun 2021-2022

		2021	2022
1.	Sosialisasi peran PPID untuk Pengelolaan dan Penyediaan informasi publik Badan Publik	-	√
2.	Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat	-	√
3.	Penyebaran informasi publik melalui website nttprov.go.id	√	√
4.	Dialog interaktif tentang program pemerintah melalui Radio dan Televisi	√	√
5.	Pembuatan iklan layanan masyarakat tentang informasi pemerintah	√	√
6.	Pembuatan media luar ruangan terkait informasi publik	√	√

Tabel 3.1 menjelaskan bahwa terdapat beberapa program kerja Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan Tahun 2021 – 2022. Terdapat empat program kerja yang konsisten dilakukan dari Tahun 2021 dan juga dua program kerja yang baru berjalan Tahun 2022. Program Kerja yang tertera pada tabel di atas telah terlaksana dengan baik. Humas pada umumnya tidak mempunyai program kerja khusus, dalam melaksanakan tugas kehumasan menyesuaikan dengan program kerja diskominfo yang telah tertera dalam rencana kerja Diskominfo.

c. Job Description Kehumasan

Pembagian tugas dan tanggung jawab Humas dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Susunan Tim Multimedia Diskominfo Prov. NTT berdasarkan
Jabatan, Kedudukan dan Tugas dalam Tim¹⁴

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
1.	Drs. Aba Maulaka	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Pembina/Pengarah	Membina, mengarahkan dan memberikan dukungan serta petunjuk
2.	Sylvia Cornelia Francis, S.Psi	Kepala Bidang	Ketua Tim Multimedia	1. Memimpin, mengkoordinasi dan mengandalkan Tim Multimedia dalam pelaksanaan seluruh kegiatan; 2. memimpin rapat anggota Tim Multimedia.
3.	Ita Kana, SH, MM	Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda/ Kepala Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Media dan Sumber	Coordinator Tim Peliputan Dokumentasi dan <i>Livestreaming</i>	1. Mengkoordinasi proses pelaksanaan <i>Livestreaming</i> kegiatan Pemerintahan; 2. Mengkoordinasi perencanaan peliputan dokumentasi kegiatan;

¹⁴ Surat Keputusan Kepala Diskominfo Prov. NTT Nomor : 048 / 177 / KOMINFO 2.1 / KEP / 2022 tentang Pembentukan Tim Multimedia pada Dinas Komunikasi Prov. NTT tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
		Daya Komunika Publik		3. Mengkoordinasi dukungan perangkat, SDM Peliputan dan <i>Livestreaming</i> . 4. Mengkoordinasikan Penyerahan hasil peliputan dan <i>vicor</i> kepada coordinator media sosial paling lambat satu hari
Anggota				
	Paris Z. Djababain	Pengadministrasi sarana dan prasarana	Petugas <i>Livestreaming</i>	1. Menayangkan kegiatan / acara yang telah tersusun serta menjaga kelancaran dari siaran <i>livestreaming</i> secara kualitatif; 2. Bertanggungjawab dalam hal kelancaran jalannya program tayang serta menjaga kualitas penayangan gambar pada <i>livestreaming</i> ; 3. Mengatur kualitas output audio pada kegiatan peliputan secara langsung atau rekaman; 4. bertanggungjawab untuk memastikan alat-alat tambahan / penunjang audio bisa berfungsi dengan baik; 5. menyiapkan peralatan dan perlengkapan dalam kegiatan peliputan.
	Yunnir M. Kiu, S.Sos, M.Si	Analisis Publikasi		
	Mario F. Lawi, S.Ikom	Pranata Humas Ahli Pratama		
	Moch Arief	Tenaga Kontrak		
	Jemmy J. Doh			
	Simon O. Banoet			
	Moses F.T. Silu A.Md.Kom			
	Dalmasis Sna			
	Maya Ida S. Djawas, SE			
4.	Rammy A. Kadiwano, S.Sos, M.Si	Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda/ Kepala Seksi Pengelolaan Media Informasi, Dokumentasi Kelembagaan Dan Aspirasi Publik.	Koordinator Pengelolaan Media Sosial	1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pembuatan konten serta editing; 2. Memantau dan memastikan bahwa konten tersebut telah di unggah di media sosial minimal satu hari setelah diserahkan oleh tim peliputan dan dokumentasi; 3. Monitoring dan mengevaluasi respon warganet tentang isi konten yang di unggah; 4. Melaporkan respon warganet untuk ditindaklanjuti; 5. Mengkoordinasikan <i>design layout/cover</i> kegiatan yang akan dipublikasikan melalui <i>livestreaming</i> dan kegiatan pemerintah lainnya;

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
Anggota				
	Yohanes B. Bai Mari, S.Fil	Analisis Data Standarisasi	Editor dan design konten media sosial dan <i>livestreaming</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyunting atau mengumpulkan video yang sudah diambil maupun direkam; 2. Menyusun ulang potongan video sesuai naskah atau scenario; 3. Memilih bahan dokumentasi yang dibutuhkan dan mendesign tampilan konten agar lebih menarik; 4. Membuat narasi atau <i>caption</i> yang berhubungan dengan konten.
	Linberthi Duma, SS	Analisis Konten Media		
	Dominggo N.F. Beraona	Tenaga Kontrak		
	Detry H. Irawan, S.Kom			
	Malkhiades N, S.Kom			

Tabel 3.2 mendeskripsikan uraian tugas dan tanggung jawab dari anggota Tim Multimedia. Kepala Diskominfo berperan sebagai Pembina dan Pengarah, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik berperan sebagai Ketua Tim Multimedia. Kepala Seksi Pengelolaan Layanan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik sebagai Koordinator Tim Peliputan Dokumentasi Dan *Livestreaming* dan memiliki anggota sebanyak 8 orang, Kepala Seksi Pengelolaan Media Informasi, Dokumentasi, Kelembagaan dan Aspirasi Publik sebagai Koordinator Tim Pengelolaan Media Sosial memiliki anggota sebanyak 5 orang.

3.2 Tujuan Organisasi Kehumasan (*Why*)

Setiap kegiatan yang dilakukan dari suatu instansi tentu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan humas sendiri antara lain untuk menjalankan fungsi kehumasan dimana memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pemerintah yang berdampak kepada masyarakat agar dapat terciptanya keterbukaan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Realisasi tujuan organisasi dapat dilihat dari target yang menjadi patokan dalam menjalankan suatu program dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi.

a. Target dan Pencapaian Tujuan

Target program kerja yang telah berjalan yang terkait dengan kerja humas pemerintahan telah berjalan dengan baik dan sebagian besar mencapai target yang memuaskan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) memuat tiga poin terkait target humas pemerintahan yang tergambar pada diagram 3.1.

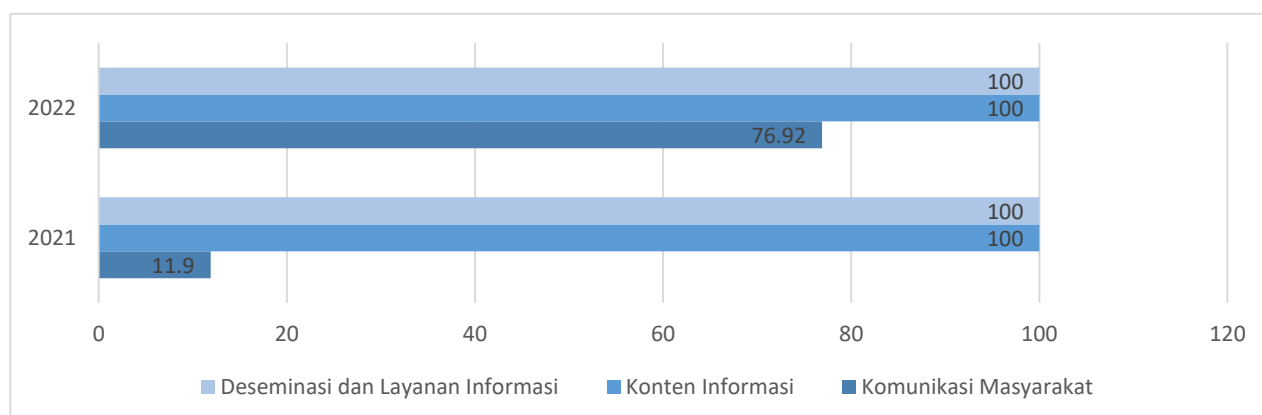


Diagram 3.1 **Presentase Pencapaian Kinerja Humas Tahun 2021-2022¹⁵**

Diagram di atas menggambarkan mengenai peningkatan target dalam tiga poin utama terkait kegiatan kehumasan yang tertuang dalam LPPD NTT yaitu:

1. Presentase komunikasi masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah NTT yang menyebarkan informasi dan kebijakan. Tahun 2021 mencapai target sebesar 11,90% dan meningkat pada Tahun 2022 yaitu sebesar 76,92%. Indikator penilaian dalam poin ini dihitung dari jumlah pemohon informasi di website PPID, kunjungan website, kunjungan media sosial Diskominfo.
2. Presentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintahan sesuai strategi komunikasi (Strakom). Tahun 2021 sebesar 100% dan Tahun 2022 sebesar 100% dengan jumlah konten keseluruhan, sebanyak 104 konten, di antaranya 83 konten terkait program kegiatan pemerintahan, dan 21 konten terkait regulasi pemerintah.
3. Presentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (Starkom) yang telah ditetapkan. Tahun 2021 mencapai target sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100% dengan spesifikasi yaitu: 38 informasi dibagikan melalui *Youtube* Diskominfo, 30 informasi dibagikan melalui *Facebook* Diskominfo, dan 21 informasi dibagikan melalui *instagram* Diskominfo.¹⁶

Selain target yang telah tercapai seperti yang telah dijelaskan di atas, Pemprov pada Tahun 2021 mendapatkan peringkat Terbaik III pada penghargaan Anugerah Media Humas Kategori Komunikasi Publik untuk Kelompok Pemerintah Provinsi.¹⁷ Komisi Informasi Pusat juga memberikan penghargaan kepada Pemprov sebagai Badan Publik Menuju Informatif dengan nilai 83,88%. Tahun 2023, Pemrov berhasil menduduki peringkat 5 Nasional Kategori Pemerintah Provinsi dengan Penyelenggaraan SPBE Tahun 2022 dengan indeks 3,35 atau predikat Baik.¹⁸

b. Kendala atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Humas

Humas pemerintahan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik namun belum maksimal dikarenakan beberapa kendala yang ditemukan pada lingkup internal antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran

Anggaran dalam pelaksanaan tugas kehumasan merupakan salah satu penentu berhasil tidaknya humas pemerintahan menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, terdapat refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah sehingga mempengaruhi beberapa kegiatan kehumasan dan tidak berjalan secara maksimal, ada juga kegiatan yang sama sekali tidak berjalan akibat dari kebijakan tersebut.

2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam kegiatan penyebarluasan informasi pemerintahan. media yang digunakan humas yaitu melalui website resmi Provinsi NTT, website PPID, Media Sosial resmi pemerintah (Instagram, Facebook dan Youtube) dan juga

¹⁵ Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2022

¹⁶ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 & 2021

¹⁷ Kementrian Kominfo RI, "AMH 2021, Menkominfo Dorong Humas Ciptakan Konten Kreatif Berbasis Digital," n.d., https://www.kominfo.go.id/content/detail/37929/siaran-pers-no-392hmkominfo112021-tentang-amh-2021-menkominfo-dorong-humas-ciptakan-konten-kreatif-berbasis-digital/0/siaran_pers.

¹⁸ Diskominfo Prov. Ntt, "Pemprov Ntt Raih Peringkat Ke-5 Nasional Kategori Daerah Tk. I Penyelenggaraan Spbe Tahun 2022," 2023, <https://Diskominfo.Nttprov.Go.Id/2023/02/25/Pemprov-Ntt-Raih-Peringkat-Ke-5-Nasional-Kategori-Daerah-Tk-I-Penyelenggaraan-Spbe-Tahun-2022/>.

melalui siaran radio dan televisi. Sarana prasarana terkait kegiatan kehumasan yang kurang memadai seperti keterbatasan kamera untuk digunakan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1
Sarana Prasarana Kehumasan.¹⁹

Gambar di atas menunjukkan bahwa sarana prasarana penunjang kinerja humas masih tergolong kurang karena ketersediaannya yang terbatas sehingga kurang menunjang kinerja Humas. Dalam kegiatan kehumasan dimana seharusnya diperlukan lebih banyak kamera untuk proses kegiatan kehumasan, selain dari segi kuantitas, diperlukan juga kamera dengan kualitas yang baik agar hasil peliputan informasi dapat berjalan secara maksimal. Akibat dari kurangnya sarana prasarana juga dapat mengganggu efisiensi waktu dalam pelaksanaan tugas kehumasan.

3. Kualitas SDM

Kualitas SDM menjadi faktor penghambat keberhasilan kerja humas pemerintahan. Pegawai yang menjalankan tugas sebagai humas pemerintahan provinsi dominan tidak memiliki latar belakang pendidikan mengenai IT. Selain itu, masih kurangnya pelatihan terkait teknologi informasi untuk pegawai akibat *refocusing* anggaran. Kuantitas pegawai di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik diskominfo NTT dinilai kurang memadai.

Kendala eksternal yang juga menghambat kinerja humas yakni kurangnya partisipasi aktif dan respon masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Partisipasi dan respon masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan penyampaian informasi pemerintahan. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan dapat dilihat dari respon masyarakat di kanal Media Sosial Pemerintahan seperti *Instagram*, *Youtube* dan *Facebook*. Pengetahuan masyarakat terhadap media penyebaran informasi pemerintah masih kurang dikarenakan belum adanya sosialisasi terkait hal tersebut.

3.3 Pelaksanaan Program Kerja Humas Pemerintahan (When)

Pelaksanaan program kerja humas yang telah berjalan berdasarkan Renstra dan Renja Diskominfo Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Terlaksananya sosialisasi terkait PPID di Kabupaten Malaka sebanyak dua kali sosialisasi;

¹⁹ Data dokumen Diskominfo.

2. Terbentuknya kelompok Informasi Masyarakat di lima Kabupaten yaitu Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Belu;
3. Terlaksananya penyebaran informasi publik melalui website pemerintah dan website PPID Provinsi NTT (Sebanyak 883 Dokumen mengenai penyelenggaraan pemerintahan diupload);
4. Terlaksananya dialog interaktif terkait informasi pemerintahan yang disiarkan oleh pemerintah melalui radio negeri maupun swasta (RRI Kupang, RRI Ende, RRI Belu, RRI Rote, Radio Terilok Kupang dan Radio Suara Kupang), Satisun TVRI Kupang;
5. Terlaksananya pembuatan iklan layanan masyarakat;
6. Penyampaian informasi melalui media luar ruangan berupa pemasangan baliho terkait informasi kegiatan pemerintahan.

3.4 Evaluasi Kinerja Humas Pemerintahan (*What*)

Diskominfo melakukan survei kepuasan Layanan Informasi Publik untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Informasi Pemerintahan dengan mengambil sampel sebanyak 40 orang.

Tabel 3.3
Klasifikasi Survei Layanan Informasi Pemerintahan Berdasarkan Umur²⁰

No	Usia	Jumlah
1.	< 25 Tahun	5 orang
2.	25 – 40 Tahun	20 orang
3.	>40 Tahun	15 orang
Total		40 orang

Tabel di atas menunjukkan sample yang telah dikelompokkan berdasarkan usia yang menjadi responden yang diambil berasal dari kalangan masyarakat yang menggunakan layanan informasi publik. Berikut tabel klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan.

Tabel 3.4
Klasifikasi Survei Layanan Informasi Pemerintahan Berdasarkan Pekerjaan.²¹

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pelajar	5 orang
2.	Guru/Dosen	4 Orang
3.	ASN	15 Orang
4.	Karyawan Swasta	12 Orang
5.	Petani	4 Orang
Total		40 Orang

Tabel 3.4 menjelaskan bahwa semua kalangan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi pemerintahan. Survei dilakukan dalam bentuk penyebaran kuisioner dibagikan kepada masyarakat. Kuisioner survey berisi 13 pertanyaan dan hasil yang diperoleh adalah sangat memuaskan dengan rata-rata presentase sebesar 85.076%.

²⁰ Laporan Kinerja Bidang Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Prov. NTT Tahun 2022

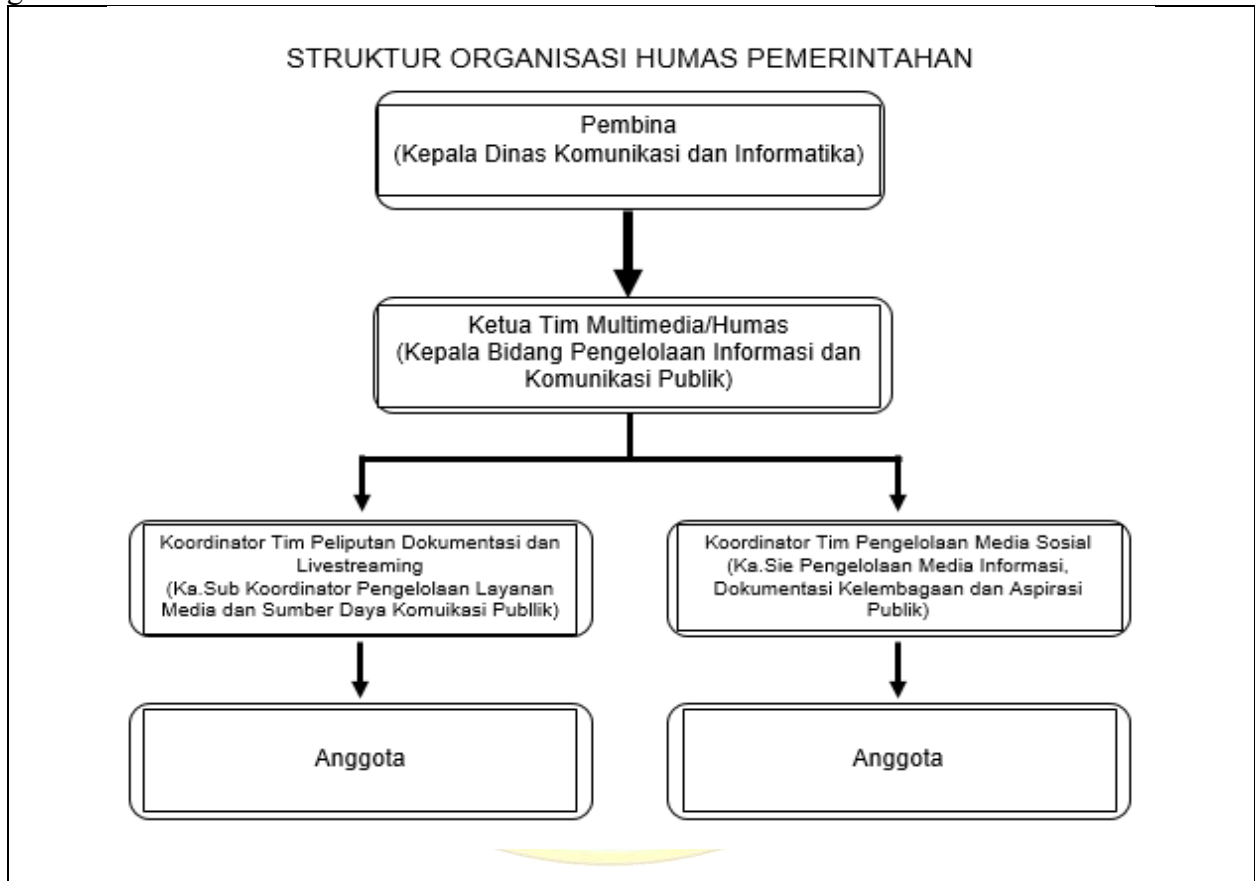
²¹ Laporan Kinerja Bidang Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Prov. NTT Tahun 2022

3.5 Pengorganisasian Humas Pemerintahan (*Who*)

Diskominfo memutuskan, menetapkan, serta mengatur kegiatan pemberian informasi pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan guna mencapai tujuan pelayanan informasi pemerintahan secara maksimal kepada masyarakat. Pengorganisasian dilakukan untuk mengatur semua kegiatan kehumasan terkait pengelolaan informasi pemerintahan.²²

a. Struktur Organisasi Humas Pemerintahan

Pengorganisasian Tim Humas berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala Diskominfo NTT Nomor : 048 / 177 / KOMINFO 2.1 / KEP / 2022 tentang Pembentukan Tim Multimedia pada Dinas Komunikasi tahun 2022. susunan organisasi humas pemerintahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2
Struktur Organisasi Humas pemerintahan Provinsi NTT²³

Susunan organisasi Humas pemerintahan Provinsi NTT dikepalai oleh Kadis Kominfo yang berperan sebagai pembina. Tim humas ada di bawah Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sehingga diketuai oleh kepala bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Tim humas terbagi dalam dua tim yaitu tim peliputan, dokumentasi dan *livestreaming* yang bertugas meliput berita atau turun langsung ke lapangan. Tim kedua yaitu tim pengelolaan media sosial yang bertugas untuk mengelola data informasi dan dokumentasi dari tim peliputan untuk dijadikan konten informasi bagi masyarakat. Setiap komponen yang ada memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

²² Surat Keputusan Kepala Diskominfo Prov. NTT Nomor : 048 / 177 / KOMINFO 2.1 / KEP / 2022 tentang Pembentukan Tim Multimedia pada Dinas Komunikasi Prov. NTT tahun 2022.

²³ Surat Keputusan Kepala Diskominfo Prov. NTT Nomor : 048 / 177 / KOMINFO 2.1 / KEP / 2022 tentang Pembentukan Tim Multimedia pada Dinas Komunikasi Prov. NTT tahun 2022.

b. Lembaga Kemitraan Humas pemerintahan

Diskominfo bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan maupun swasta untuk menyebarluaskan informasi pemerintahan. Humas pemerintahan bekerja sama dengan 39 Perangkat Daerah Provinsi NTT dalam pengelolaan website PPID dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan pemerintahan guna mewujudkan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Humas pemerintahan juga bekerja sama dengan lembaga penyiaran seperti lembaga TV Nasional yaitu TVRI dan stasiun radio nasional serta swasta, media cetak (Koran Timor Express, Pos Kupang), perguruan tinggi di Provinsi NTT, Pimpinan umat beragama dan lembaga kepolisian yaitu Kepolisian Daerah NTT dalam penyebaran informasi pemerintahan.

3.6 Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Kehumasan (*Where*)

Pelaksanaan tugas kehumasan tentu saja berkontak langsung dengan masyarakat, sebagai perpanjangan pemerintah untuk menampung aspirasi rakyat dan sebagai pelayan informasi pemerintahan untuk masyarakat.

a. Ruang Lingkup Kerja Kehumasan

Fungsi humas pemerintahan dijalankan oleh Diskominfo. Humas pemerintahan bergerak dibawah bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan mempunyai tim khusus yang dibentuk untuk menjalankan fungsi kehumasan. Adapun ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang humas pemerintahan ialah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di lingkup pemerintahan.

Humas juga bertugas untuk menjaga dan mengontrol hubungan internal, eksternal dan audit komunikasi kehumasan. Hubungan internal yang dimaksud ialah menjaga hubungan antar organisasi pemerintahan agar tetap harmonis. Hubungan eksternal yang dimaksud ialah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dimana humas berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan informasi pemerintahan dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Humas sebagai audit komunikasi kehumasan dimana dalam tugas ini, humas berorientasi melakukan pengontrolan, analisis dan evaluasi terhadap program kerja atau sistem komunikasi yang berkaitan dengan lingkungan internal maupun eksternal dalam lingkup pemerintahan agar mengetahui sejauh mana efektifitas program mengenai komunikasi publik yang dijalankan.

b. Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Kehumasan

Humas pemerintahan didukung oleh sarana prasarana dalam menunjang kinerjanya. Adapun sarana prasarana tersebut berupa ruangan pengelolaan informasi publik, website pemerintahan daerah (www.nttprov.go.id), website e-PPID (<http://www.ppidutama.nttprov.go.id>), media sosial resmi pemerintah (*Youtube, Instagram, Facebook*) dan beberapa alat penunjang kinerja yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Daftar Sarana dan Prasarana Humas pemerintahan
Provinsi Nusa Tenggara Timur.²⁴

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Website Pemerintah	1	Baik
2.	Website PPID	1	Baik
3.	Youtube	1	Baik
4.	Instagram	1	Baik

²⁴Dokumen Diskominfo Provinsi NTT, 2023

5.	Facebook	1	Baik
6.	Computer	4	Baik
7.	Kamera	3	2 Baik, 1 Rusak
8.	Kamera Shooting	1	Baik
9.	Handycam	1	Baik
10.	Kamera vidcon	2	Baik
11.	Drone	2	Baik

Sesuai dengan tabel diatas, sarana prasarana dalam pengelolaan informasi pemerintahan sudah memadai dan kondisinya baik. Namun, kuantitas sarana dan prasarana masih kurang dan perlu diadakan pengadaan sarana dan prasarana agar ketika dalam proses kerja humas, tidak terkendala jika ada beberapa kegiatan kehumasan yang diselenggarakan dalam waktu bersamaan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan informasi pemerintahan menggunakan metode enterprise architecture di Provinsi NTT telah berjalan dengan baik namun belum maksimal dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dibuktikan dengan pengujian terhadap enam indikator yaitu:

1. Metode kerja dan pembagian kerja humas pemerintahan dijalankan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Diskominfo Prov. NTT Nomor : 048 / 177 / KOMINFO 2.1 / KEP / 2022 tentang pembentukan Tim Multimedia Provinsi NTT dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.
2. Tujuan utama humas pemerintahan untuk menyampaikan informasi pemerintah dinilai mencapai target dibuktikan dengan tercapainya program kerja yang berkaitan dengan humas pemerintahan walaupun ada beberapa yang belum ter-realisasikan akibat dari *refocusing* anggaran. Humas pemerintahan Provinsi NTT juga mendapatkan penghargaan terkait pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan program kerja pemerintahan sudah berjalan dengan baik tetapi, terdapat beberapa program kerja yang tidak dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya *refocusing* anggaran oleh pemerintah.
4. Evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja tim humas dinilai baik karena mampu mencapai target kerja dari yang telah ditargetkan dan mampu memenuhi standar baik dari hasil evaluasi masyarakat berdasarkan hasil survey yang dilakukan maupun evaluasi tingkat nasional.
5. Tim humas berada di bawah bidang pengelolaan informasi dan komunikasi public telah melaksanakan pelayanan informasi pemerintahan yang diberikan sudah sesuai standar namun ada beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya dari segi internal maupun eksternal yaitu masih minimnya anggaran untuk menunjang program kerja yang telah disepakati dalam rencana kerja tahunan, kurangnya sarana dan prasarana kehumasan, kurangnya kemampuan SDM di bidang teknologi dan informasi serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan informasi pemerintahan.
6. Ruang lingkup tugas humas pemerintahan adalah segala kegiatan pemerintahan yang terkait dengan fungsi kehumasan. Humas juga bertugas mengontrol segala kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan informasi pemerintahan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD saja sebagai model studi kasus yang dipilih sesuai dengan teori yang digunakan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan kepada rekan-rekan lainnya agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan informasi pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar bisa menemukan hasil yang lebih mendalam dan dapat melihat perkembangan kedepannya

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pihak pemerintah daerah terkhususnya diskominfo Provinsi NTT yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian serta Bapak Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aulia Rahmawati and Krisanjaya Krisanjaya, “Literasi Media Untuk Mengantisipasi Berita Palsu (Hoaks) Di Media Sosial Bagi Masyarakat Pulau Tidung Kepulauan Seribu,” *Sarwahita* 16, no. 01 (2019): 68–74, <https://doi.org/10.21009/sarwahita.161.07>.

Departemen Ilmu Komunikasi and Universitas Indonesia, “Etika Media Di Era ‘Post-Truth’” V, no. April (2017): 75–79.

“Detail Data Statistik Hoaks Agustus 2018 - 31 Maret 2020 - PPID Kominfo,” accessed October 16, 2022, https://eppid.kominfo.go.id/informasi_publik/Informasi_Publik_Setiap_Saat/detail/57.

“BPS Provinsi NTT,” accessed October 16, 2022, <https://ntt.bps.go.id/indicator/2/1040/1/persentase-penduduk-berumur-5-tahun-ke-atas-yang-mengakses-internet-termasuk-facebook-twitter-bbm-whatsapp-dalam-3-bulan-terakhir.html>.

Dyah Risky, “Fenomena Post Truth Dalam Kampanye Politik Di Media Sosial Twitter,” 2020. Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Skmm.Kes Dr. Sandu Siyoto, “Dasar Metodologi Penelitian - Google Books,” June 1, 2015, https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Metodologi_Penelitian/Qphfdwaaqbaj?hl=Id&gbpv=1&dq=Buku+Metode+Penelitian&printsec=Frontcover.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.

Surat Keputusan Kepala Diskominfo Prov. NTT Nomor : 048 / 177 / KOMINFO 2.1 / KEP / 2022 tentang Pembentukan Tim Multimedia pada Dinas Komunikasi Prov. NTT tahun 2022 Kementrian Kominfo RI, “AMH 2021, Menkominfo Dorong Humas Ciptakan Konten Kreatif Berbasis Digital,” n.d., https://www.kominfo.go.id/content/detail/37929/siaran-pers-no-392hmkominfo112021-tentang-amh-2021-menkominfo-dorong-humas-ciptakan-konten-kreatif-berbasis-digital/0/siaran_pers.

Diskominfo Prov. Ntt, “Pemprov Ntt Raih Peringkat Ke-5 Nasional Kategori Daerah Tk. I Penyelenggaraan Spbe Tahun 2022,” 2023, <https://diskominfo.nttprov.go.id/2023/02/25/Pemprov-Ntt-Raih-Peringkat-Ke-5-Nasional-Kategori-Daerah-Tk-I-Penyelenggaraan-Spbe-Tahun-2022/>.